

Peran dan Kerjasama Gereja Bethel Indonesia Torsina dengan Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat di daerah Olafuliha'a, Pantai Baru, Rote Ndao: Implementasi Roma 13:1-7

Ivonne Sandra Sumual¹, Lois Hasudunga², Aldi Abdillah³, Ferdinand Edu⁴

^{1,2,4}Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta

³Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, DKI Jakarta
abdillah.aldi@gmail.com

Abstract: *Welfare is the main goal that must be achieved in a government system. The government is also said to be successful if there is equitable welfare and is felt by the people under its government. To achieve this goal, of course, the government cannot walk alone. There needs to be a synergy from all parties so that there must be involvement of all parts involved in a government system, one of which is the church. The church is not just a religious institution that carries out a service program for church members. Rather, more than that, the church must take real action in realizing prosperity for all levels of society, both inside and outside the church. Therefore, the church and the government need to work together to become a driving force for the creation of prosperity that is coveted by all people. This study uses a qualitative method with data analysis of the GBI Torsina Case Study in the Olafuliha'a area, Pantai Baru, Rote Ndao. The implementation in this case study departs from understanding the background of Paul's letter to the Romans in Romans 13:1-7. The results showed that GBI Torsina built good relations with the government in the context of the welfare of the wider community in the Olafuliha'a area, Pantai Baru, Rote Ndao. Cooperation is carried out in the form of policies that are harmonized together for the benefit of the wider community.*

Keywords: *church-state relation; GBI Torsina; Romans 13; social welfare*

Abstrak: Kesejahteraan merupakan tujuan utama yang harus dicapai di dalam sebuah sistem pemerintahan. Pemerintahan juga dikatakan berhasil apabila terjadi kesejahteraan yang merata dan dirasakan oleh masyarakat dibawah pemerintahannya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Perlu adanya sinergi dari seluruh pihak sehingga mesti adanya pelibatan seluruh bagian yang terlibat di dalam sebuah sistem pemerintahan salah satunya adalah gereja. Gereja bukan sekedar lembaga keagamaan yang melakukan program pelayanan kepada warga gereja saja. Melainkan, lebih dari itu gereja harus memberikan aksi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada baik di dalam maupun di luar gereja. Maka dari itu gereja dan pemerintahan perlu berjalan bersama menjadi pendorong untuk terciptanya kesejahteraan yang didambakan oleh semua masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data Studi Kasus GBI Torsina di daerah Olafuliha'a, Pantai Baru, Rote Ndao. Implementasi dalam studi kasus ini berangkat dari pemahaman latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 13:1-7. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa GBI Torsina membangun hubungan baik dengan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara luas di daerah Olafuliha'a, Pantai Baru, Rote Ndao. Kerja sama dilakukan dalam bentuk kebijakan yang diselaraskan bersama untuk kepentingan masyarakat luas.

Kata kunci: GBI Torsina; kesejahteraan masyarakat; relasi gereja-pemerintah; Roma 13

PENDAHULUAN

Indonesia, dan hampir banyak bangsa di Dunia, telah masuk dalam pemikiran postmodern yang erat dengan pluralisme dan relativisme.¹ Corak berpikir tersebut sering dipandang negatif karena dapat melemahkan bangsa. Namun jika ditelisik dengan seksama, tidak ada yang salah dengan corak berpikir tersebut. Hal ini seharusnya menjadi peluang untuk membangun hubungan yang selebar-lebarnya dengan banyak pihak. Dalam hidup bermasyarakat, setiap manusia mendambakan sebuah rasa aman dan kesejahteraan dalam hidupnya. Rasa aman yang tercipta dalam kehidupan masyarakat bertalian dengan sistem pemerintahannya. Untuk mencapai tujuan itu, Gereja sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan mesti ikut bersama didalamnya. Maka dari itu kehadiran sebuah gereja sudah semestinya mengambil andil dalam kesejahteraan masyarakat dan pemerintahannya.

Menelisik kepada definisi gereja secara umum. Gereja berasal dari bahasa Yunani yakni "*ekklesia*" yang artinya dipanggil keluar (*ek=keluar; kaleo=memanggil*) dari kegelapan (dunia ini) menuju terang-Nya yang ajaib. Penulis-penulis dalam Perjanjian Baru menggunakan kata *ekklesia* ini merujuk persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Yesus untuk "menghadirkan Kristus" di muka bumi ini (Kis 1:8). Sebagai buah dari panggilan orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru ini adalah lahirnya gereja dan jemaat-jemaat lokal diberbagai daerah. Ada makna yang dalam dari sebuah panggilan Allah terhadap orang percaya yang mana panggilan Allah itu membawa kepada sebuah perubahan status dan pola hidup dari orang percaya yang membawa transformasi bagi banyak orang.² Penyelamatan dan kemuliaan Allah haruslah yang menjadi pokok utama dalam menjalankan panggilan Allah untuk menghadirkan Kristus di muka bumi ini. Ini lah yang akan mentransformasi kehidupan orang percaya yang nantinya membawa kepada sebuah usaha untuk mensejahterakan sekitarnya.

Kristus sebagai pendiri gereja memastikan rencana-Nya bagi gereja dan tujuan-Nya melalui gereja. Tujuan utama gereja adalah menyampaikan kabar baik sesuai dengan Matius 28:19-20.³ Namun pada masa kini, Gereja tidak menjalankan amanat itu dengan baik dan lebih mementingkan serta mengutamakan uang bukan tentang kesehatan gereja yang diharapkan semua orang (Eksistensi gereja).⁴ Bahkan kasus yang tak kalah ketinggalan adalah praktek korupsi di dalam gereja. Menurut data yang ada bahwa pada tahun 2011 dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial dari Kementerian Agama RI terhadap pembangunan gedung gereja St.

¹ A M Hasiholan Tambunan and Andreas Budi Setyobekti, "Ekstraksi Pemahaman Cyprianus Tentang Extra Ecclesiam Nulla Salus Bagi Gereja Pentakosta Di Era Postmodern," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pentekosta* 4, no. 1 (2021): 28-42; Anggi Maringan Hasiholan and Yehezkiel V Fernando, "Manfaat Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Siswa Pendidikan Kristen Pada Era Postmodern," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 2401-2410.

² Wendy S. Hutahean, *Sejarah Gereja Indonesia* (Malang: Ahli Media Press, 2017).

³ Y. M. Imanuel Sukardi, "Gereja Ekstra Biblikal Dan Tanggung Jawab Dalam Menyelesaikan Amanat Agung," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pentekosta* 1, no. 2 (2019) 133-147.

⁴ Fibry Jati Nugroho, "Gereja dan Kemiskinan: Diskursus Peran Gereja di Tengah Kemiskinan," (*Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1, 2019) 100-112.

Maria Banneaux, NTT.⁵ Demikian juga terdapat dugaan korupsi dana gereja senilai 2,3 Miliar dari GKI Serpong pada tahun 2015.⁶

Maka gereja meskipun lebih berfungsi sebagai penuntun spiritual pada dasarnya harus peka kepada keadaan di sekitarnya. Gereja perlu ikut berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat. Peran gereja dalam masyarakat misalnya yang terjadi di Tomohon, Sulawesi Utara. Grace, dkk menganalisis peran gereja lokal dalam memberdayakan masyarakat di sekitar Kota Tomohon. Gereja lokal yang ada melaksanakan program pengolahan kelapa-kayu kepada masyarakat, termasuk bagi pemuda-pemuda putus sekolah atau lulusan SMP sederajat. Dalam hal ini gereja berhasil meningkatkan. Pengolahan kelapa-kayu ini berhasil menghasilkan beberapa produk lokal seperti meubel, bahan bangunan, dan souvenir, yang pada akhirnya membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam hal ini peran gereja terhadap sosial masyarakatnya mencerminkan suatu hubungan yang bisa terjalin antara gereja dengan pemerintah. Urusan pemberdayaan masyarakat nyatanya bukan hanya urusan pemerintah semata. Dikotomi bahwa gereja hanya mengurus hal-hal spiritual sedangkan pemerintah mengurus hal-hal nyata dalam masyarakat harusnya luntur dan tidak relevan lagi, karena gereja pada dasarnya juga bisa memberikan kontribusi yang nyata.

Contoh kerja sama gereja dan pemerintah misalnya juga terlihat di dalam pengamatan Anita, dkk di Kediri, Jawa Timur. Anita, dkk menemukan bahwa terjadi kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dengan pihak gereja untuk meningkatkan minat pariwisata, yang mana bangunan gereja menjadi situs wisatanya. Kerja sama meningkatkan daya tarik wisata ini pada pelaksanaannya memunculkan sumber pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat.⁷ Maka jika dianalogikan sebenarnya hubungan pemerintah dan gereja bisa seperti simbiosis mutualisme, pihak pertama maupun kedua bisa saling diuntungkan, atau dalam hal ini bisa juga dikatakan sama-sama berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh adalah tindakan yang dilakukan oleh komunitas My Home Bekasi yang melakukan kerja sama kontrak dengan Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Efendi dalam mengurus revitalisasi hutan kota. Bersama pemerintah daerah tim My Home juga melaksanakan kerja bersama membagi-bagikan sembako kepada masyarakat Bekasi yang terkena dampak pandemi Covid-19.⁸

⁵ "Korupsi Dana Gereja, Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara," *Surat Kabar Timor Express*, last modified 2016, accessed July 1, 2021, <http://www.terasntt.com/korupsi-dana-gereja-terdakwa-divonis-2-tahun-penjara/>.

⁶ Eka Adhi Wibowo and Heru Kristanto, "Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan Dan Pengendalian Internal," (*Jurnal Integritas* 3, no. 2, (2017) 105–136.

⁷ Anita Sulistiyuning Gunawan, Djamhur Hamid, and Maria Goreeti Wi Endang, "Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)," *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 32, no. 1 (2016): 1–8.

⁸ Maruap Sianturi, "My Home Bekasi MHB Bagikan 250 Paket Sembako Untuk Warga Yang Terdampak Corona Dalam Aksi Bekasi The City of Harmony," *Efnews.Id*, last modified 2021, accessed July 12, 2021, <https://efnews.id/detailberita/my-home-bekasi-mhb-bagikan-250-paket-sembako-untuk-warga-yang-terdampak-corona-dalam-aksi-bekasi-the-city-of-harmony>.

Namun melihat catatan peristiwa keadaan masa lampau sampai dengan sekarang bahwa kehadiran gereja kerap kali menjadi kontroversi di dalam pemerintahan. Berdasarkan survei MPRK UGM tercatat bahwa pada tahun 2008 terdapat 15 kasus pelanggaran yang terkait dengan rumah ibadah. Moderate Muslim Society [MMS] (2009) mencatat 12 kasus pelanggaran terkait rumah ibadah pada 2009, mulai dari pemerasan agar dapat menggunakan gereja, intimidasi, hingga perusakan lalu pendirian 22 Gereja di Jakarta secara kontroversi. Regulasi negara dan regulasi sosial yang jelas diperlukan guna pembangunan sebuah gereja agar tidak menimbulkan kontroversi di dalam pemerintahan.⁹

Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tidak dapat membuat gereja dan pemerintah saling menyalahkan. Gereja tidak hanya berhenti pada peningkatan spiritulitas manusia melainkan harus hadir secara nyata memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menghadirkan program-program sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Dengan ini gereja mengarahkan manusia untuk mengimplementasi nilai-nilai yang ditanamkan oleh gereja dalam diri manusia.¹⁰

Tindakan pro aktif dari gereja untuk bekerja sama dengan pemerintah telah terjadi pada GBI Torsina. Hubungan ini sudah terjalin selama 10 tahun terakhir. Kedua pihak secara simultan melakukan hubungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan dari GBI Torsina ini berangkat dari pemahaman akan surat Paulus kepada jemaat Roma di Roma 13:1-7. Penelitian terkait hubungan gereja dan pemerintah telah dilakukan hanya sebatas pemaparan normatif. Tidak menyentuh kepada aspek implementasi. Seperti yang dilakukan oleh Sanjaya dkk yang membahas mengenai konsep teologi Politik.¹¹ Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranoto,¹² Helweldery¹³ dan Moru¹⁴ yang hanya membahas relasi antara kedua lembaga.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, hal yang menjadi kebaruan di dalam penelitian ini adalah suatu penjelasan yang bukan hanya di tataran filosofis saja, namun mulai bergerak kepada hal-hal konkrit yang benar-benar terjadi dalam konteks masyarakat. Maka artikel ini akan menawarkan akan suatu deskripsi peran

⁹ Ihsan Ali-Fauzi et al., "*Kontroversi Gereja Di Jakarta Dan Sekitarnya*", (Yayasan Wakaf Paramadina: Yogyakarta, 2011) 8-10

¹⁰ Winfrid Prayogi, "*Mencari Esensi Dan Misi Gereja Dalam Konteks Indonesia Awal Abad 21*," (Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan 1 no. 1, 2000) 39-51.

¹¹ Yudhy Sanjaya, Josanti, and Aldrin Purnomo, "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4," *Real Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 1-8.

¹² Minggu Minarto Pranoto, "Relasi Gereja Dengan Negara," *Jurnal Amanat Agung* 5, no. 1 (2009): 1-12.

¹³ Ronald Helweldery, "Gereja Dalam Konteks Relasi Negara Dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja)," *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, no. 69 (2014): 124.

¹⁴ Osian Orjumi Moru, "Mereposisi Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen," *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 118.

dan sinergitas yang konkrit terjadi di suatu konteks lokal antara gereja GBI Torsina dengan pemerintah lokalnya sebagai wujud implemmentasi Roma 13:1-7.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. John W. Creswell mendefinisikan kasus sebagai suatu tata yang terhubung (*bounded system*) dengan ruang dan waktu, sehingga membuat peneliti perlu menelusuri konteks ruang dan waktu tersebut dari suatu tata yang kemudian disebut sebagai kasus atau peristiwa.¹⁵ Khairani dan Manurung menjelaskan bahwa suatu studi kasus bertujuan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Penelitian studi kasus juga tidak dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap kumpulan fenomena tertentu, melainkan hanya khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti saja.¹⁶

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa sumber data mulai dari kata-kata, tindakan, hingga sumber tertulis.¹⁷ Adapun di dalam artikel ini dilakukan teknik pengumpulan data sumber kata-kata dan tindakan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada dua pihak yakni pemerintah dan gereja. Dalam hal ini pihak pemerintah diwakilkan oleh ketua RT/RW setempat, dan pihak gereja diwakilkan oleh gembala GBI Torsina. Observasi penelitian dilakukan di daerah Olafuliha'a, Pantai, Baru, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi dari GBI Torsina.

Sumber-sumber tertulis dalam artikel ini mengacu kepada teori-teori terkait seperti ragam hubungan antar masyarakat menurut ilmu sosiologi, hingga kepada konsep kesejahteraan. Juga mengenai sumber tertulis, peneliti menambahkan eksplorasi teks Roma 13:1-17 yang menggunakan proses hermeneutika penafsiran genre surat. Douglas Stuart dan Gordon Fee menjelaskan bahwa terdapat dua jenis analisis terhadap genre surat di Alkitab, yakni analisis konteks historis pasal yang sedang ditafsir, dan juga konteks susunan sastra atau paragrafnya.¹⁸ Maka buku-buku yang membahas mengenai latar belakang Surat Roma, maupun tafsiran-tafsirannya juga dipergunakan dalam artikel ini.

Peneliti kemudian akan menganalisis keterhubungan antara hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, teori-teori yang dipaparkan, dengan eksplorasi ayat dari Roma 13:1-7. Hasil dari analisis dari ketiga unsur ini akan menggambarkan bagaimana titik temu hubungan antara GBI Torsina dengan pemerintah lokal setempat. Pada akhirnya akan tergambarkan mengenai penjelasan akan studi kasus

¹⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1998).

¹⁶ Ade Irma Khairani and Wan Rajib Azhari Manurung, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Case Study* (Jakarta: Trans Info Media, 2021).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 40th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

¹⁸ Douglas Stuart and Gordon D. Fee, *Hermeneutik: Menafsirkan Firman Tuhan Dengan Tepat*, Revisi 2. (Malang: Gandum Mas, 2015).

mengenai peran dan Kerjasama Gereja Bethel Indonesia Torsina dengan pemerintah di daerah Olafuliha'a, Pantai Baru, Rote Ndao dalam mensejahterahkan masyarakat di sekitarnya.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hubungan antarmasyarakat menurut Ilmu Sosiologi

Ilmu sosiologi memandang hubungan dalam tataran masyarakat, seperti gereja dengan negara sebagai hubungan sosial. Secara sederhana hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok sosial dan bersifat saling mempengaruhi. Hubungan sosial ini tentunya erat berkaitan dengan interaksi sosial. Gillin berkomentar bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok, dimana hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁹

Terdapat dua proses yang bisa muncul dalam interaksi sosial baik itu secara positif maupun negatif. Soekanto menjelaskan proses tersebut dengan istilah proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah hubungan sosial atau interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan persatuan satu sama lain, dan terjalannya hubungan yang positif satu sama lain. Hubungan sosial bersifat asosiatif ini terdiri dari kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Keempat bentuk proses asosiatif ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kerja sama adalah usaha bersama yang dilakukan antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Akomodasi yaitu usaha kelompok atau individu untuk mengatasi ketegangan konflik yang terjadi. Asimilasi yaitu berbaurnya kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya yang menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas dari kebudayaan yang asli.²⁰ Dan Akulturasi yaitu proses percampuran kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya tanpa menghilangkan unsur dari kebudayaan yang asli.²¹

Proses sosial disosiatif merupakan proses terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antarindividu maupun kelompok. Hal ini tentunya mengarah kepada persaingan (kelompok atau individu yang saling menjatuhkan dengan cara kekerasan maupun siasat menjatuhkan dan prasangka), kontravensi (perasaan kebencian yang ditutupi), perpecahan, pertikaian, dan penghinaan.²² Proses terjadinya hubungan sosial pun meliputi beberapa syarat penting yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan antarindividu maupun kelompok, baik secara langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder) yang menyebabkan terjalannya sebuah interaksi diantara kelompok maupun individu.

¹⁹ Angeline Xiao, "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat," (Jurnal Komunka : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika 7, no. 2: 2018). 94-95

²⁰ Naftali Untung, Priskila Issak Benyamin, and Yogi Mahendra, "Inkulturasi Liturgi Gereja Bethel Indonesia," *THRANOS: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 65-74.

²¹ Soerjono Soekanto and Budi Sustyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 58.

²² W.A Gurungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 2-3.

Dalam hal ini tentu ada pesan yang hendak disampaikan oleh individu maupun kelompok. Syarat selanjutnya adalah komunikasi yaitu penyampaian pesan dari individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses komunikasi inilah yang nantinya membentuk sebuah tanggapan terhadap pesan yang disampaikan.²³

Kontak sosial dan komunikasi yang menjadi syarat dalam membentuk sebuah hubungan sosial ini tidak selalu bersifat positif dalam lingkungan masyarakat. Ada kalanya hal ini justru dapat bersifat negatif apabila individu atau kelompok menggunakannya sebagai alat untuk mengeksploitasi individu maupun kelompok lain atau digunakan dengan agenda politik tertentu yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lainnya. Karena itu individu maupun kelompok adalah memegang peran besar dalam menentukan arah sebuah hubungan sosial positif atau negatif.

Dalam berlangsungnya sebuah proses hubungan sosial individu dan kelompok, perlu diperhatikan bahwa ada beberapa faktor penting yang menjadi pendorong berlangsungnya hubungan sosial individu dan kelompok. Faktor-faktor pendorong itu antara lain adalah simpati, empati, kondisi lingkungan, mayoritas penduduk, faktor pendidikan serta faktor ekonomi. Didalamnya terdapat nilai kebersamaan sebagai satu bangsa dalam kemajemukan.²⁴ Interaksi tersebut pada masa kini dapat dilakukan dengan media sosial.²⁵

Pertama, Simpati merupakan suatu tindak kepedulian seseorang terhadap orang lain. Orang yang bersimpati akan berusaha untuk menempatkan dirinya sesuai dengan orang lain yang menjadi objek dari rasa simpati itu. Kedua, Empati adalah perasaan yang mendalam melebihi dari simpati yang mempengaruhi sampai kepada jiwa seseorang. Ketiga, Kondisi lingkungan juga turut menjadi faktor pendorong hubungan sosial. Kondisi lingkungan yang menerima keberadaan individu maupun kelompok dapat memberikan ruang yang lebar untuk terjadinya interaksi serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Keempat, adalah mayoritas Penduduk dapat memberikan dukungan terhadap individu maupun kelompok dalam berlangsungnya sebuah hubungan sosial. Kelima, adalah faktor pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni guna mensejahterakan hidupnya dan lingkungannya. Keenam, adalah faktor ekonomi. Manusia secara kodratnya salah satunya merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*). Secara langsung keadaan ekonomi di dalam sebuah masyarakat berperan penting dalam mengendalikan keberlangsungan hubungan sosial. Ekonomi yang mumpuni tentunya lebih mudah untuk mensejahterakan lingkungan masyarakat begitupula dengan sebaliknya.

²³ Soekanto and Sustyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

²⁴ Andreas Budi Setyobekti, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen, "Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta," *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 1 (2021): 1-10.

²⁵ Purim _ Marbun and Alex Frans Nathanael Nasution, "Improving The Quality Of Information, Communication Technology Based Theology Learning," *SISFOTENIKA* 11, no. 1 (2021).

Selain faktor yang mendukung terjadinya interaksi sosiologis, terdapat juga faktor penghambat yang menjadi penghalang dalam berlangsungnya proses hubungan sosial dalam masyarakat. Setidaknya terdapat empat faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses hubungan sosial yaitu hambatan sosiologis, hambatan antropologis, hambatan ekologis, serta hambatan ideologis. Hambatan sosiologis merupakan hambatan yang berhubungan dengan perbedaan status sosial, agama, kedudukan, dan pendidikan. Hambatan sosiologis dapat mempengaruhi proses kemajuan masyarakat. Sebagai contohnya adalah dikotomi yang terjadi antara orang yang miskin dan kaya jadi persoalan terbesar dalam memajukan masyarakat. Hambatan yang kedua adalah hambatan antropologi. Pada umumnya hambatan ini mencakup kepada perbedaan ras, etnis, dan suku bangsa. Ketiga, ada hambatan ekologis yaitu hambatan yang mencakup mengenai hubungan timbal balik makhluk hidup dengan kondisi sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah hambatan ideologis. Hambatan ini berkaitan dengan pegangan hidup seseorang. Hal ini biasa terjadi karena dipengaruhi oleh *worldview* yang ada di dalam sebuah masyarakat.²⁶

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam istilah umum merujuk kepada keadaan baik, kondisi makmur, sehat dan damai. Dari sudut pandang ekonomi, kesejahteraan dihubungkan dengan keuntungan benda yang mampu mendatangkan keuntungan bagi hidup manusia. Sudut pandang kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷ Merujuk kepada Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Dijelaskan secara tersurat bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Negara dan seluruh pihak terkait mesti menjamin kehidupan masyarakat mengalami kehidupan kesejahteraan tersebut.

Dalam teori hirarki kebutuhan Maslow diklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam lima tingkatan yaitu, kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Semua kebutuhan manusia ini apabila tidak terpenuhi sepanjang masa hidup manusia maka akan menimbulkan ketidaksejahteraan bagi manusia.²⁸ Ketidaksejahteraan di dalam diri masing-masing individu memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Manusia yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi timbul rasa ketidakpuasan akan keadaan hidup yang ada sekarang, ini

²⁶ Soekanto and Sustyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

²⁷ Elvina Elvina and Musdhalifah Zebua, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening," (JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 3, no. 1, 2019) 1-9.

²⁸ Abraham Maslow, *Motivation and Personality: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Gramedia, 1984), 41.

yang kemudian mendorong manusia melakukan segala hal untuk memenuhi kehidupannya bahkan hal negatif sekalipun seperti merampok, menipu, dan membunuh.

Pemenuhan akan kebutuhan hidup manusia adalah tindakan yang menyejahterakan kehidupan manusia. Permasalahan yang begitu kompleks yang terjadi di Indonesia seperti kemiskinan, kriminalitas, sebagai bukti bahwa kebutuhan hidup manusia belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu kesejahteraan juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang terjadi. Di tengah permasalahan sosial yang sangat kompleks pemerintah dan gereja harus menjaga dan memastikan bahwa kesejahteraan terjadi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui kebijakan publik serta program yang dirancang oleh pemerintah dan gereja yang dalam hal ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu gereja harus membangun “jembatan swadaya” dengan pemerintahan guna menghasilkan suatu kebijakan serta program yang menyeluruh antara warga gereja dan masyarakat.

Menurut pendapat Amich Alhumami, fokus dari pembangunan kesejahteraan di dalam masyarakat berfokus kepada dua hal yakni *“economic development”* dan *“social welfare.”*²⁹ *Economic Development* dengan pembangunan ekonomi yang mendatangkan keuntungan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup. *Social Welfare* berkaitan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, mengutamakan hak-hak sosial, dan redistribusi keuntungan untuk membatu layanan sosial bagi masyarakat yang miskin, dan berkekurangan.³⁰

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berfokus kepada satu aspek dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial yang terjalin baik-baik saja, tidak selalu menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah tercapai. Sebab kesejahteraan mencakup setiap aspek dari kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia serta dorongan sehingga manusia sanggup meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi nilai bagi orang lain itulah kesejahteraan yang sesungguhnya.

Konteks Roma 13:1-7

Tulisan-tulisan Paulus banyak menyangkut mengenai permasalahan yang secara universal terjadi di kalangan kekristenan seperti penebusan, keselamatan, anugerah Allah, akhir jaman serta pembenaran oleh iman sebagaimana yang menjadi pokok persoalan di dalam surat Roma. Beberapa teolog meneliti dan mengatakan bahwa Paulus tidak bermaksud untuk menguraikan secara luas mengenai pokok-pokok teologis. Melainkan, Paulus berusaha untuk menjelaskan pandangan mengenai permasalahan yang ada di dalam kehidupan orang-orang kristen pada waktu itu yang menjadi tujuan suratnya. Sebagaimana yang ada di dalam Roma khususnya

²⁹ Agus Suryono, *“Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat,”* (Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi VI: 2014) 98–102.

³⁰ Ahmad Suhendi, *“Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,”* (Cawang: Pusat Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial RI, 2013) 105–116.

pada pasal 12-16 yang berkenaan dengan nasihat-nasihat terhadap persoalan yang di alami.³¹

Dalam tulisannya, Paulus berusaha untuk memberikan jawaban teologis atas setiap permasalahan yang terjadi. Karena itu surat-surat Paulus sebagian besar bagiannya berorientasikan kepada persoalan di dalam kekristenan. Persoalan yang Paulus hadapi dalam menuliskan surat Roma adalah kehidupan perseketuan yang mengalami perselisihan, kesalahpahaman, pertikaian, dll. Dalam Surat Roma, Paulus memberikan penjelasan bahwa perselisihan yang terjadi adalah disebabkan oleh dua golongan yakni orang-orang kristen yang beragama Yahudi dan orang-orang kristen non-Yahudi pada waktu itu.

Pokok persoalan yang menjadi perdebatan diantara dua golongan ini tak lain tak bukan adalah banyak menyangkut mengenai sistem, tradisi, aturan-aturan keagamaan khususnya agama Yahudi, yang dilakukan guna mencapai kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Salah satu persoalan yang dibahas adalah mengenai hukum Taurat yang dianggap sebagai yang tertinggi dalam menjalankan setiap praktek keagamaan.³²

Melihat permasalahan itu Paulus menasihatkan bahwa diantara mereka tidak ada yang boleh meninggikan diri dan merendahkan yang lain. Melainkan, mereka harus bersatu serta menggunakan setiap karunia yang diberikan oleh Allah untuk saling menopang satu sama lain terlebih lagi untuk memuliakan Allah.

Surat Roma memberikan penjelasan juga bahwa Paulus dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul di dalam jemaat, ia bukan saja memberikan pengertian secara teologis. Melainkan, Paulus juga memberikan nasihat kepada mereka serta teladan hidup yang nyata. Bertolak dari hal tersebut, maka dari itu Paulus dalam tulisannya di bagi ke dalam dua bagian yaitu bagian pemikiran fungsional yang berkaitan kepada alasan-alasan teologis (pasal 1-11) dan nasihat praktis yang mengarah kepada pesan moral (pasal 12-16) yang di dasari dari alasan-alasan teologis tersebut.

Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma bahwa mereka harus hidup dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya dengan ukuran iman (ps 12:3) dan tuntutan kasih (ps 14-15). Nasihat itu tentunya diperkuat dengan alasan-alasan teologis yang Paulus jelaskan pada pasal-pasal sebelumnya (1-11). Baik orang Yahudi maupun Non-Yahudi mendapat keselamatan hanya dari karya Kristus (Rm 1:16-17).

Dalam Roma 13:1-7 Paulus memberi nasehat kepada jemaat yang ada di Roma. Pada saat itu 54-56 SM pada saat kepemimpinan Kaisar Nero. Saat itu kaum Zelot tidak membayar pajak, memberontak kepada pemerintahan, dan mengacaukan masyarakat. Pada saat itu juga Kaisar Nero mencabut keputusan

³¹ Stanley Refly Rambitan, *Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Takut Kepada Pemerintah?*, (Jakarta: UKI Press, 2019). 6-8

³² Hendi, "Studi Roma 13:1-7 : Ketaatan Kepada Pemerintah Sebagai Wujud Kesadaran Moral," (Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan, 2014): 199-218.

pengusiran orang Yahudi dan banyak orang Yahudi balik ke Roma. Tetapi orang-orang Zelot yang membuat kekacauan dan tidak membayar pajak kepada pemerintahan, sehingga membuat sebagian orang Yahudi takut untuk diusir kembali oleh Kaisar. Paulus yang mendengar hal itu membuat surat dan memberi saran untuk menyelesaikan persoalan. Persoalan khusus yang terjadi di Roma adalah kaum Zelot melakukan gerakan politik, sehingga jemaat Roma juga merasa takut dan tidak tunduk kepada pemerintahan Roma.

Dijelaskan juga bahwa Paulus memiliki maksud dalam penulisan tersebut yaitu Paulus mau agar setiap orang disana hidup dengan harmonis satu sama lain. Jadi, dengan terciptanya keharmonisan diharap semua saling menghargai, keputusan yang dibuat harus dilaksanakan demi kesejahteraan sesama.

Pasal 13:1-7 tentu tidak ditulis tanpa latar belakang, melainkan terbentuk dari sebuah latar belakang serta memiliki kesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya. Pasal 13:1-7 terletak diantara pasal 12:9-21 dan pasal 13:8-14 yang mana kedua bagian itu bertemakan tentang kasih. Menelisik secara sekasama pasal 13:1-7 maka akan menemukan beberapa kata yang memiliki makna yang sama terhadap pasal 12 dan 13. Seperti ἀγαθός/κακός, yang memiliki arti baik, good (Rm 12:21 dan 13:3-4); ὀργή yang memiliki arti murka, *to wrath* (Rm. 12:9; 13:4-5). Karena itu Roma 13:7 merupakan satu bagian serta kesinambungan dari pasal sebelumnya dan ayat sebelumnya.³³

Kata *tassō* mempunyai arti menetapkan (Kis. 15:2), menentukan, menunjukkan, mengangkat, memerintahkan, mengarahkan. Dalam kedua ayat yang disebutkan ini (Rm 13:1-2). Kata ini disandingkan dengan kata *anthēstēken* dan *anthestēkōtes*, yang berasal dari kata *anthistēmi* dan memiliki arti yang kurang lebih sama, yakni melawan atau menentang. Berdasarkan pemakaian kata-kata tersebut terlihat jelas bahwa dalam kedua ayat ini Paulus menasehati jemaat di Roma agar takluk, menempatkan diri di bawah pemerintah atau para pejabat yang di atasnya dan tidak boleh melawan pemerintah yang memimpin mereka. Otoritas atau kekuasaan yang dimiliki para pejabat itu asalnya dari Allah. Allahlah yang menetapkan pemerintah itu. Oleh karena itu, melawan pemerintah sama halnya berarti melawan ketetapan Allah.

Alasan teologis ini sesuai dengan pandangan tradisional yang ada dalam perspektif bangsa Israel, yang melihat kekuasaan raja asalnya dari Allah. Raja hanyalah wakil Allah, sedangkan raja yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Dalam kisah Daud yang berdosa dengan menyalahgunakan kekuasaannya, Tuhan berbicara dengan perantaraan Nabi Natan untuk mengingatkan kepada Daud bahwa ia telah menjadi raja karena pemberian Tuhan, "... Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda..." (2 Sam. 12:8). Sekali lagi ditekankan hal itu terjadi atas pemberian Tuhan. Ketika Raja Zedekia serta bangsa Yehuda ingin memberontak melawan Babel, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yeremia agar jangan

³³ Paskalis Edwin I Nyoman Paska, "Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?" (Malang: STP IP, 2015): 1-7.

melawan Babel karena "Sekarang, Aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hamba-Ku, yakni Nebukadnezar, raja Babel; bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nekubadnezar, raja Babel, akan Kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar" (Yer. 27:6-8).

Paulus memberikan alasan mengapa orang percaya tidak perlu takut kepada pemerintah bila berbuat baik diberikan dasar teologis: karena "pemerintah itu hamba (diakonos) Allah untuk kebaikanmu" (ay. 4). Kata "hamba" di sini diterjemahkan dari kata Yunani diakonos. Kata *diakonos* memiliki pengertian yang berbeda dengan kata *doulos*. Kata *doulos* mengarah kepada status sosial yang sangat rendah, tidak memiliki hak, budak, atau milik orang lain. Sedangkan kata *diakonos* mengarah kepada fungsi atau peran sebagai pelayan/hamba.³⁴ Peran seorang pelayan yang dimaksudkan disini berfokuskan kepada klien yang sedang dilayaninya. Seorang pelayan tidak egois melainkan, ia berusaha untuk mencari tau apakah klien yang dilayani nya sudah terpenuhi atau tidak kebutuhannya. Demikianlah peran pemerintah. Ia berfungsi sebagai hamba Allah yang menyediakan dan membagikan anugerah Allah bagi kebaikan manusia, agar manusia bisa hidup tenang dan tenteram (1 Tim. 2:2). Pemerintah ada untuk membantu dan melayani rakyatnya, agar mereka bisa hidup baik, yakni menikmati keadilan, keselamatan, dan keamanan. Kebaikan rakyat dalam negara demokratis dirumuskan dalam konstitusi, yang menekankan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Apakah orang Kristen sekarang ini harus mengikuti nasihat Paulus serta merta seperti itu? Bagaimana orang percaya dapat yakin bahwa para pejabat itu dari Allah dan ditentukan oleh Allah? Mengingat Roma 13:1-7 sering dipakai oleh penguasa kristiani yang lalim untuk memaksa rakyatnya takluk kepada mereka, tidak mengherankan bahwa banyak yang menolak untuk memakai Roma 13:1-7 sebagai landasan dalam bersikap terhadap pemerintah dewasa ini.

Khiem dalam pendapatnya menyarankan agar teks ini dimengerti sebagai nasihat pastoral yang menekankan dimensi personal dan kolektif dari kehidupan bergereja. Para pejabat pemerintah yang dibicarakan di sini adalah para pejabat pemerintah tertentu bukan pemerintah sebagai sebuah entitas politik yang general. Konteks perikop ini adalah kembalinya orang-orang Yahudi ke kota Roma. Sebelumnya, mereka diusir oleh Kaisar Klaudius karena keributan yang terjadi antara orang Yahudi yang Kristen dengan Kristen non Yahudi merusak ketenteraman kekaisarannya. Ketika orang Yahudi kembali lagi ke Roma, setelah kematian Klaudius, terjadi lagi ketegangan, tetapi kali ini ketegangan dalam Gereja sendiri, yakni ketegangan antara orang-orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Ketegangan antar etnis ini menimbulkan ketakutan jangan-jangan pemerintahan Romawi akan mengusir mereka lagi karena keributan itu. Oleh

³⁴ Chandra Wie Wie Yasinta Priska Dewi, "Kasih dan Takut Akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Histris Roma 13:1-7," (Jurnal Consilium, 2021) 72-93.

karena itu, Paulus menulis surat Roma 13:1-7 ini, meminta mereka takluk kepada pemerintah. Dengan kata lain, ajakan dalam Roma 13:1-7 bukanlah ajaran umum tentang hubungan jemaat dengan Negara, melainkan nasihat khusus untuk situasi ketegangan intern dalam jemaat, disertai ketakutan jemaat itu terhadap intervensi baru penguasa Roma.

Titik Temu Gereja dan Pemerintah dalam Roma 13:1-7: GBI Torsina dengan Pemerintahan setempat

Surat Roma 13:1-7 ini perlu dikaji lebih dalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan perikop tersebut. Jika merujuk kepada bahasa Yunani nya maka ada tiga kata yang perlu mendapatkan fokus. Kata tersebut yaitu *exousía*, *tassō*, dan *Theos Allah*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian konteks Roma 13:1-7 bahwa landasan teologis yang menjadi alasan manusia takluk kepada pemerintah bahwa semua pemerintah ada di bawah kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah mengendalikan segalanya sampai kepada sejarah manusia, termasuk stabil dan tidak stabilnya keadaan manusia.

Ketundukan yang dilakukan manusia terhadap suatu pemerintahan yang sah tentu tidak dilakukan secara buta dalam artian tunduk seperti budak yang tidak memiliki hak. Melainkan, dengan kerinduan akan sebuah perdamaian, keadilan, serta keteraturan yang sesuai dengan tujuannya Allah bagi semua manusia dengan lingkungannya.³⁵ Ketundukan manusia kepada pemerintah juga merupakan sikap takut akan Allah dan mengasihi sesama, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Kedaulatan Allah juga berlaku bagi pemerintah. Apabila dinilai dari natur tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah maka sudah selayaknya pemerintah mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan seperti pajak. Namun apa yang diperoleh haruslah dipergunakan untuk mendatangkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kehidupan gereja dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang sangat penting tetapi saling melengkapi karena setiap orang membutuhkan kedua hal tersebut. Tetapi hal itu harus disadari dan diakui antara dua pihak mengenai kedudukan masing-masing. Agar keduanya menjadi mitra kerja yang aktif dan kreatif dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui pemerintah mengurus hal duniawi seperti mengurus kehidupan kemasyarakatan menuju kesejahteraan, disamping itu gereja mengurus hal spritual dan mental tetapi gereja pun harus mampu dan sanggup memaikan perannya dalam kesejahteraan baik lingkup jiwa atau spritual maupun lingkup kehidupan sosial dan ekonomi guna menuju kesejahteraan.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada gembala GBI Torsina dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Ketua RT/RW setempat ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai titik temu antara gereja dan pemerintahan, seperti didukungnya program-program yang pemerintah adakan, sinergi dalam menciptakan infrastruktur sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, hingga kepada saling memberi-

³⁵ Ronald W. Johnson, *"The Christian and the State"*, (Review and Expositor 97: 2000): 94

kan usul antara gereja dan pemerintah, yang mana tetap mengarah kepada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Menurut wawancara kepada Ketua RT/RW setempat, GBI Torsina mempunyai peran sebagai tameng utama di dalam keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini menurutnya diperlihatkan oleh keikutsertaan gereja dalam memberikan pengaman dalam pelaksanaan beberapa program pemerintah, seperti pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur, ataupun Presiden. GBI Torsina juga dianggap telah begitu membantu menjaga keamanan di lingkungan setempat. Dalam kondisi tertentu gereja juga membagi sembako kepada masyarakat terutama kepada anak yatim piatu, janda, orang tua yang sudah renta dan lanjut usia. Hal ini membuat GBI Torsina menurut tuturan Ketua RT/RW telah menjadi teladan yang baik, yang bukan hanya di lingkungan setempat, tetapi hingga kepada desa tetangga.

Di sisi sebaliknya, terdapat beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat sebagaimana pengakuan dari gembala GBI Torsina. Gereja menjadi ujung tombak dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat, mulai dari dibuatnya surat permohonan oleh gereja hingga disuarakan di dalam forum pemerintah setempat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti lahan, persediaan bibit tanaman bagi petani, persediaan tali, dan perahu bagi nelayan maupun tani rumput laut. Berdasarkan penjelasan gembala GBI Torsina bahwa pemerintah setempat mulai dari RT/RW, Kelurahan serta Kecamatan ikut serta dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT/RW, kesejahteraan masyarakat adalah ketika kebutuhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik terpenuhi dan itu sangat penting. Maka dari itu pemerintah juga menyambut baik suara kebutuhan masyarakat dari gereja dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu.

Gembala GBI Torsina juga menjelaskan bahwa gereja turun langsung dalam mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat adalah kurangnya pasokan air bersih ke kehidupan mereka. Maka dari itu gereja berinisiatif untuk membuka sumur buatan agar dapat menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah pun tidak menutup mata dan telinga akan kebutuhan masyarakat tentang air bersih sehingga diadakanlah program PAMSIMAS atau Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk mendukung apa yang telah gereja lakukan. Maka kedua pihak antara gereja dan pemerintah turut bekerja sama dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat. Gereja menyediakan tempat serta tenaga kerja untuk keperluan pembukaan sumur tersebut sedangkan pemerintah setempat menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan seperti pipa air, mesin penyedot air, tempat air, dll. Hasilnya kebutuhan masyarakat akan air bersih pelan-pelan sudah mulai terpenuhi.

Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat juga ternyata bukan hanya sekedar air bersih namun kebutuhan akan kecukupan hidup khususnya sandang dan pangan menjadi hal yang harus diperhatikan. Mengingat bahwa kondisi perekonomian masyarakat setempat belum sangat maju seperti kota-kota besar.

Melihat hal ini gereja maupun pemerintah juga bersinergi. Gereja menyediakan lahan untuk jemaat dan masyarakat bercocok tanam agar dapat menghasilkan sumber daya alam yang dapat dijual nantinya guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pemerintah juga turut bekerja sama dengan gereja dengan membantu perijinan serta menyediakan bibit-bibit tanaman dari sumber daya alam yang dibutuhkan. Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat mulai terjawab.

Adapun Ketua RT/RW setempat sangat mengharapkan dan menganjurkan kepada gereja untuk merealisasikan program pendidikan anak di usia dini, alasannya karena pendidikan masih sangat rendah di lingkungan tersebut dan juga menjadi satu tiang penopang atau mengeratkan hubungan keduanya. Ketika anak-anak diajarkan sejak dini tentang karakter hidup yang baik akan menciptakan manusia yang berbobot dan dapat bermanfaat bagi semua orang.

Dalam perjalanannya GBI Torsina juga melaksanakan beberapa program yang ditujukan guna menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan serta mendidik dan membimbing jemaat. GBI Torsina mengadakan Program doa bersama dengan jemaat dengan tujuan untuk mendoakan gereja mereka, wilayah, serta pemerintahan setempat agar senantiasa dapat bekerja dengan maksimal memberikan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Gembala GBI Torsina juga mengatakan bahwa pemerintahan turut andil dalam membentuk spiritualitas jemaat dengan cara menghimbau serta mengarahkan jemaat untuk datang beribadah secara khusus kepada mereka yang belum memiliki tempat beribadah.

Hubungan antara GBI Torsina dan pemerintah bukan tidak memiliki masalah di antara keduanya. Gembala GBI Torsina menuturkan bahwa di awal terbentuknya gereja ini ternyata sempat mengalami beberapa permasalahan dalam hal pendirian gereja tersebut. Gembala sidang GBI Torsina mengatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam pembangunan gereja justru adalah oknum-oknum pemerintah dari desa. Namun beliau tetap berusaha untuk membangun dan meminta ijin dari sinode serta Kecamatan setempat untuk pembangunan tersebut, karena menurut beliau bahwa dirinya sebagai warga negara mempunyai hak asasi untuk mendirikan rumah ibadah di wilayah Olafuliha'a, Pantai Baru, Rote Ndao ini. Adapun hambatan yang melatarbelakangi pembangunan tersebut adalah sebelumnya Gembala Sidang dari GBI Torsina ini berjemaat di gereja lokal setempat yakni GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) lalu kemudian ingin mendirikan Gereja sendiri atas dasar kerinduan hati dan panggilan dari Allah. Alasan lain mengapa beliau ingin mendirikan gereja adalah sebab keberadaan beliau di GMIT tidak diperhatikan sehingga merasa terabaikan. Akan tetapi, hal itu dilarang sebab menurut aturan dari GMIT bahwa tidak diperbolehkan ada gereja lain atau jemaat yang membangun gereja sendiri dengan sinode yang berbeda di tempat itu. Inilah alasan mengapa pemerintah desa melarang pembangunan GBI Torsina pada waktu itu. Namun pada akhirnya GBI Torsina berhasil didirikan dan juga sah di dalam keberadaannya.

Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara gereja GBI Torsnia dengan pemerintah lokal yang ada maka dapat digambarkan bahwa terjadi hubungan interaksi sosial asosiatif atau suatu jalinan hubungan yang mengarah pada kerja sama dan persatuan satu dengan yang lainnya. Hubungan asosiatif ini berkembang ke arah yang lebih positif yakni kerja sama, atau suatu usaha yang dilakukan antar kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Proses kerja sama ini benar-benar begitu terlihat di antara GBI Torsina dengan pemerintah setempat untuk bersama-sama memenuhi hajat hidup masyarakat di sekitarnya. Meski terdapat hambatan juga di awal-awal hubungan antara GBI Torsina dan pemerintah desa dalam hal ideologis ketika awal pendirian gereja, namun hal ini tidak berlangsung lama karena hubungan antara keduanya nyatanya begitu terbangun di waktu-waktu berikutnya. Dengan demikian titik temu antara pemerintah dan GBI Torsina dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat terletak pada kesadaran akan esensi dari eksistensi gereja dan pemerintahan yang didukung melalui program-program serta kebijakan-kebijakan yang dibuat.

KESIMPULAN

Kesejahteraan masyarakat tentunya hal yang sangat di dambakan bagi masyarakatnya itu sendiri serta bagi pemerintahan memerintah. Kesejahteraan masyarakat juga menandakan bahwa program pemerintahan yang dijalankan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kesejahteraan bersifat menyeluruh di dalam sebuah sistem pemerintahan. Pemerintahan yang dibentuk di dalam sebuah lingkungan masyarakat haruslah menjadikan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan utama dalam menjalan sistem pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang di dalam alinea ke-4 dalam UUD 1945 dan juga sebagaimana yang terkandung dalam UU No.6 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1-2 tentang "Kesejahteraan Sosial".

Perlu diingat teks Roma 13:1-7 bukanlah sebuah dogma, bukan pula semacam aturan untuk diikuti lurus-lurus, melainkan sebuah nasihat pastoral untuk menanggapi situasi kongkrit yang dihadapi umat. Yang terpenting adalah makna dan semangat inti yang ada di dalamnya dan perlu kearifan dalam menerapkannya pada situasi kongkrit dewasa ini. Pertama, harus disadari bahwa teks ini memang mengatakan bahwa orang percaya harus takluk (*hupotasso*), tetapi bukan menaati (*hupakouō*), secara mutlak dalam segala hal, apalagi menaati secara membabi buta tanpa mempertimbangkannya. Orang percaya diminta untuk memakai hati nurani, bukan bertindak seperti robot. Takluk atau menuruti pemerintah bukan hanya karena mereka telah mengatakan demikian, melainkan karena hati nurani yang membenarkannya.³⁶

GBI Torsina dan pihak pemerintah dalam hal ini RT/RW setempat melalui setiap program yang dibuat telah melakukan berbagai usaha dan berorientasi kepada kesejahteraan bagi warga gereja, terlebih lagi bagi masyarakat secara luas. Pola

³⁶ Ray Regynaldi, "Studi Etis Terhadap Ketidaktaatan Sipil Dari Perspektif Tema 'Ketaatan' Dalam Perjanjian Baru," (Jurnal Te Deum: 2016) 311-346.

pembinaan terhadap warga gerejanya tidaklah hanya sampai kepada peningkatan spiritualitas mereka, melainkan lebih dari itu gereja perlu melihat setiap potensi dalam diri warga gerejanya guna diberdayakan dalam pelayanan gerejawi maupun pelayanan kepada masyarakat secara luas. Maka dengan ini secara tidak langsung gereja telah menciptakan kesejahteraan itu bagi warga gereja dan masyarakat secara luas.

Dalam tulisan ini juga ditemukan bahwa pemerintah setempat juga perlu melakukan *treatment* kepada masyarakat agar mereka terpacu untuk aktif dan mandiri dalam memberikan kontribusi dan nilai kepada lingkungannya. Gereja dan pemerintahan memang bukan sebagai penentu dari kesejahteraan yang tercipta di masyarakat. Penentu kesejahteraan itu bisa tercapai atau tidak yakni dari setiap individunya. Namun peran gereja dan pemerintah menjadi pendorong dan pemacu yang begitu penting di dalam menciptakan suatu harapan yang begitu cerah dan menghidupkan di tengah-tengah masyarakat yang begitu sulit untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Dengan demikian gereja dan pemerintah harus menjadi katalisator dalam pencapaian kesejahteraan di dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui program kerja nyata serta kerjasama yang dibangun antara gereja dan pemerintahan. Sebab, kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan gereja dan pemerintahan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Nathanael Gratias Sumaktoyo, Anick H. T, Husni Mubarak, Testriono, and Siti Nurhayati. *Kontroversi Gereja Di Jakarta Dan Sekitarnya*, 2011.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998.
- Elvina, Elvina, and Musdhalifah Zebua. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Dan Implementasi Kebijakan Dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening." *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 1–9.
- Gunawan, Anita Sulistiyuning, Djamhur Hamid, and Maria Goreeti Wi Endang. "Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri)." *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 32, no. 1 (2016): 1–8.
- Gurungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Hasiholan, Anggi Maringan, and Yehezkiel V Fernando. "Manfaat Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Siswa Pendidikan Kristen Pada Era Postmodern." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 2401–2410.
- Helweldery, Ronald. "Gereja Dalam Konteks Relasi Negara Dan Masyarakat (Sebuah Upaya Memahami Reposisi Peran Politis Gereja)." *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, no. 69 (2014): 124.
- Hendi. "Studi Roma 13:1-7 : Ketaatan Kepada Pemerintah Sebagai Wujud Kesadaran Moral." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 15, no. 2 (2014): 199–218.
- Hutahean, Wendy S. *Sejarah Gereja Indonesia*. Malang: Ahli Media Press, 2017.

- Khairani, Ade Irma, and Wan Rajib Azhari Manurung. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Case Study*. Jakarta: Trans Info Media, 2021.
- Marbun, Purim _, and Alex Frans Nathanael Nasution. "Improving The Quality Of Information, Communication Technology Based Theology Learning." *SISFOTENIKA* 11, no. 1 (2021).
- Maslow, Abraham. *Motivation and Personality: Teori Motivasi Dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 40th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Moru, Osian Orjumi. "Mereposisi Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Iman Kristen." *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 118.
- Nugroho, Fibry Jati. "GEREJA DAN KEMISKINAN: DISKURSUS PERAN GEREJA DI TENGAH KEMISKINAN." *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1 (2019): 100–112.
- Paska, Paskalis Edwin I Nyoman. "Haruskah Kita Takluk Kepada Pemerintah?" 1, no. 1 (2015): 1–7.
- Pranoto, Minggu Minarto. "Relasi Gereja Dengan Negara." *Jurnal Amanat Agung* 5, no. 1 (2009): 1–12.
- Prayogi, Winfrid. "Mencari Esensi Dan Misi Gereja Dalam Konteks Indonesia Awal Abad 21." *Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan* 1, no. 1 (2000): 39–51.
- Rambitan, Stanley Refly. *Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Takut Kepada Pemerintah?*, 2019.
- Regynaldi, Ray, Pandangan Umum, and Peraturan Daerah Aceh. "Studi Etis Terhadap Ketidaktaatan Sipil Dari Perspektif Tema 'Ketaatan' Dalam Perjanjian Baru." *Jurnal Te Deum*, no. 1 (2016): 311–346.
- Sanjaya, Yudhy, Josanti, and Aldrin Purnomo. "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4." *Real Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 1–8.
- Setyobekti, Andreas Budi, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen. "Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta." *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 1 (2021): 1–10.
- Sianturi, Maruap. "My Home Bekasi MHB Bagikan 250 Paket Sembako Untuk Warga Yang Terdampak Corona Dalam Aksi Bekasi The City of Harmony." *Efnews.Id*. Last modified 2021. Accessed July 12, 2021.
<https://efnews.id/detailberita/my-home-bekasi-mhb-bagikan-250-paket-sembako-untuk-warga-yang-terdampak-corona-dalam-aksi-bekasi-the-city-of-harmony>.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sustyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Stuart, Douglas, and Gordon D. Fee. *Hermeneutik: Menafsirkan Firman Tuhan Dengan Tepat*. Revisi 2. Malang: Gandum Mas, 2015.
- Suhendi, Ahmad. "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial." *Pusat Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial RI* 18, no. 02 (2013): 105–116.
- Sukardi, Y. M. Imanuel. "Gereja Ekstra Biblikal Dan Tanggung Jawab Dalam Menyelesaikan Amanat Agung." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 1, no. 2 (2019): 133–147.

- Suryono, Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* VI, no. September (2014): 98–102.
- Tambunan, A M Hasiholan, and Andreas Budi Setyobekti. "Ekstraksi Pemahaman Cyprianus Tentang Extra Ecclesiam Nulla Salus Bagi Gereja Pentakosta Di Era Postmodern." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 28–42.
- Untung, Naftali, Priskila Issak Benyamin, and Yogi Mahendra. "Inkulturas Liturgi Gereja Bethel Indonesia." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 65–74.
- Wibowo, Eka Adhi, and Heru Kristanto. "Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan Dan Pengendalian Internal." *Jurnal Integritas* 3, no. 2 (2017): 105–136.
- Xiao, Angeline. "Konsep Interaksi Sosial Dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat." *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 7, no. 2 (2018).
- Yasinta Priska Dewi, Chandra Wie Wie. "KASIH DAN TAKUT AKAN ALLAH SEBAGAI DUA PILAR SIKAP PATUH KEPADA PEMERINTAH: SEBUAH TINJAUAN GRAMATIKA-HISTORIS ROMA 13:1-7." *Jurnal Consilium* 3, no. Maret (2021): 72–93.
- "Korupsi Dana Gereja, Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara." *Surat Kabar Timor Express*. Last modified 2016. Accessed July 1, 2021.
<http://www.terasntt.com/korupsi-dana-gereja-terdakwa-divonis-2-tahun-penjara/>.